

Menteri Fadel Muhammad Ngaku Siap Diperiksa



■ Fadel Muhammad

Jakarta, RM Pembelian kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) seharga Rp 14 miliar terus dikritik. Kader banteng di Komisi IV saat ini menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Sudin menilai, jika memang hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan, maka tidak menutup kemungkinan dewan akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menindaklanjuti temuan BPK.

"Ya, sebenarnya panja tidak perlu dibentuk. Tapi, kalau memang hasil audit BPK nanti ternyata ditemukan itu (penyimpangan, red) ya bisa saja," katanya usai rapat kerja (raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sudin menilai, pembelian kapal pengawas itu benar-benar suatu pemborosan. Pasalnya, selain harganya yang sangat mahal, biaya perlengkapan tambahannya pun terlalu besar.

"Saya punya data yang menunjukkan adanya tambahan pembelian AC seharga Rp 240 juta, TV Plasma Rp 30 juta, dan kloset Rp 107 juta. Adalah hal yang mustahil kapal semewah itu belum dilengkapi pendingin udara," ungkapnya.

Berdasarkan telaahannya, lanjut Sudin, anggaran sebesar Rp 14 miliar itu jika dibelikan kapal hasil produksi PT PAL Indonesia, maka DKP bisa mendapatkan tiga buah kapal.

"Saya sudah konfirmasi dengan PT PAL, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kapal ini bisa dibuat tiga kapal,"

cetusnya.

Sudin juga menyatakan, anggaran yang dipakai untuk pembelian kapal tersebut setara dengan pembagian anggaran untuk 14 provinsi. "Yang jadi pertanyaan, apa Pak Menteri tahu tentang pembelian kapal ini," tambahnya.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Anton Sihombing meminta kepada DKP untuk tidak mengulangi pembelian kapal pengawas. Dia meminta agar instansi tersebut segera mencari jalan untuk memaksimalkan pengawasan perairan, dengan bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut dan Polri.

"Karena jumlah kerugian akibat *illegal fishing* ini cukup fantastis. Bayangkan, jika sebulanannya 45 juta dolar, maka setahunnya jumlahnya bisa 5 hingga 6 kali dari APBN kita," tukasnya.

Hal ini, kata Anton, sangat penting dikarenakan biaya anggaran pengawasan untuk DKP yang paling banyak porsinya dalam anggaran. Ini penting untuk efektifitas.

Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2S) Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso menjelaskan, pihaknya akan menjadikan kapal catamaran itu sebagai prototipe dan tidak akan membelinya lagi dari luar negeri.

"Kita tidak akan mengulangi pembelian itu. Kapal ini akan kita jadikan prototipe untuk kita kembangkan di dalam negeri," terangnya.

Aji mengakui bahwa kontrak pembelian kapal itu kini tengah diaudit BPK untuk membuktikan ada penyimpangan atau tidak dalam pengadaannya. "Kontrak juga sudah diperiksa Irjen dan tidak ada masalah," imbuhnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad menambahkan, jika memang berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan adanya penyimpangan dalam pembelian kapal pengawas itu, maka pihaknya siap dilaporkan kepada penegak hukum.

"Kita sudah lapor ke BPK dan kini sedang diperiksa. Kalau memang ada penyimpangan silakan laporkan," tegasnya. ■ RN